

EFETIVITAS PELAYANAN BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA (BPRSW) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

THE EFFECTIVENESS OF THE SERVICE OF PROTECTION AND REHABILITATION OF SOCIAL WOMEN (BPRSW) IN THE SPECIAL REGIONS YOGYAKARTA

Oleh: Erfan Erfiani dan Yanuardi, M.Si

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pelayanan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) di Daerah Istimewa Yogyakarta beserta faktor penghambat dan pendukungnya. Penelitian ini penting karena efektivitas pelayanan dapat mencerminkan keberhasilan pelayanan dalam menangani suatu permasalahan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW). Subjek penelitian yaitu Kepala BPRSW, Kepala seksi pelayanan BPRSW, Pekerja Sosial, Instruktur ketrampilan dan alumni klien BPRSW. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, dengan dilengkapi pedoman wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan BPRSW di Daerah Istimewa Yogyakarta dilihat dari indikator pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi sudah efektif. Dibuktikan dengan tercapainya tujuan dilihat dari kurun waktu pelayanan, sasaran yang telah ditetapkan dan dasar hukum, pelayanan di BPRSW terintegrasi dengan baik dilihat dari prosedur dan sosialisasi yang dilakukan, dan BPRSW mampu beradaptasi dengan baik dilihat dari peningkatan kemampuan dan sarana prasarana. Faktor penghambat adalah (1) perbedaan latar belakang masalah klien dan (2) masih rendahnya partisipasi masyarakat sehingga kurang terpenuhinya kuota target klien yang telah ditentukan BPRSW. Faktor pendukung adalah (1) kelengkapan sarana prasarana dan kerja sama antar pegawai BPRSW yang baik.

Kata kunci: Efektivitas, Pelayanan sosial, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)

Abstract

The purpose of this research was to describe the effectiveness of the service of the Protection and Rehabilitation of Social Women (BPRSW) in the special region of Yogyakarta along with factors restricting and his supporters. This research is important because the effectiveness of the service can reflect the success of the service in handling a problem in the community. This research was done in the Protection and Rehabilitation of Social Women (BPRSW). The research subjects were the leader BPRSW, the leader of services section of BPRSW, Social Worker, Skill Instructor and BPRSW client alumni. The research instrument was the researcher herself, assisted by interview and observation sheet guidance. Data collecting technique used interview, observation and documentation. The validity technique was triangulation sources. Data were analyzed using interactive model from Milles and Huberman. The result of this research that the effectiveness of the service of the protection and rehabilitation of social women (BPRSW) in the special region of Yogyakarta as seen from the indicators of achievement of the objectives, integration and adaptation is already effective. Evidenced by the achievement of the objectives viewed from the service period, the established targets and the legal basis, the services at BPRSW were well integrated from the procedures and socialization undertaken, and the BPRSW was able to adapt well to the improvement of capabilities and infrastructure. Restricting factors is the difference in background of client problems and still low level of community participation, so that less satisfy client's quota set by the porch of the Social Protection and rehabilitation of women, while supporting factor was the completeness of infrastructure and cooperation between officers in the vestibule of the Protection and Rehabilitation of Social Women (BPRSW) in the special region of Yogyakarta.

Keywords : effectiveness, social service, the Protection and Rehabilitation of Social Women (BPRSW)

PENDAHULUAN

Daerah Istimewa Yogyakarta menghadapi masalah yang begitu kompleks berkenaan dengan kesejahteraan sosial. Jumlah penyandang masalah

kesejahteraan sosial DIY sebanyak 406.951 pada tahun 2015 (BPS ,2015). Dari banyaknya permasalahan sosial yang ada di DIY salah satu permasalahan yang perlu mendapat penanganan

dari dinas sosial DIY saat ini adalah terkait dengan permasalahan wanita rawan sosial. Menurut data dari BPS tahun 2015 diatas Wanita Rawan Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 12.689jumlah ini sebenarnya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 13.166 tetapi jumlah ini masih tergolong tinggi.

Menanggapi banyaknya wanita rawan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah membentuk Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW). Badan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial DIY sebagai lembaga pelayanan masyarakat (Public Service) yang memberikan perlindungan,pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk membantu wanita dengan permasalahan sosial. Tujuan dari Badan ini adalah untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap Wanita Rawan Sosial Psikologis (WRSP) (Buku Profil BPRSW,2016).

Wanita Rawan Sosial Psikologis (WRSP) adalah wanita yang karena faktor psikologis dan sosial, baik pribadi maupun lingkungannya memiliki kerawanan atau kecenderungan melakukan penyimpangan norma serta mengalami gangguan keberfungsian sosial. Ciri dari WRSP itu sendiri adalah wanita korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ,Korban Broken Home dan ditelantarkan orang tua, korban perdagangan manusia, perempuan mantan Pekerja Seks Komersial (PSK), perempuan putus sekolah, korban eksploitasi ekonomi, pekerja migran bermasalah,dan korban kehamilan yang tidak dikehendaki. (Buku Profil BPRSW,2016).

Sistem pelayanan di BPRSW adalah penyelenggaraan rehabilitasi sistem dalam balai yaitu sistem pelayanan secara khusus dan intensif menyangkut nilai-nilai keberfungsian sosial serta pengembangan potensi warga binaan. Pengembangan potensi warga binaan dilakukan dengan pelayanan bimbingan ketrampilan yang terdiri dari tiga jenis ketrampilan, yaitu ketrampilan olahan pangan, ketrampilan jahit, dan ketrampilan tatarias (Buku Profil BPRSW, 2016).

Pada pelaksanaannya pelayanan di BPRSW dinilai kurang maksimal, hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia. Di BPRSW Yogyakarta terdapat 3 pekerja sosial fungsional yang menangani sekitar kurang lebih 60 klien yang memiliki latar belakang masalah yang berbeda-beda. Keadaan ini menunjukkan adanya keterbatasan jumlah pekerja sosial dalam menangani klien di BPRSW Yogyakarta, selain itu adanya perbedaan kemampuan setiap klien serta terbatasnya jumlah sarana dan prasarana ketrampilan jahit, tata rias, dan olahan pangan menjadi faktor penghambat dan pelaksanaan pendampingan. Dengan demikian keaktifan dari pekerja sosial dalam melakukan pendampingan dan kesadaran dari klien dirasa sangat penting guna mencapai tujuan dari pemberdayaan ketrampilan (Tulus Suseno, Pekerja Sosial BPRSW. Wawancara pada 21 November 2016 pukul 10.34 WIB).

Selain keterbatasan sumber daya manusia, BPRSW juga mengalami masalah pada faktor pendukung penyelenggaraan pelayanan yaitu masih kurangnya buku pegangan materi ketrampilan dan buku-buku bacaan lainnya. Dalam proses pendampingan bimbingan ketrampilan, buku-buku perpustakaan di panti

masih sangat sedikit. Pihak BPAD Provinsi DIY memberikan bantuan dengan adanya perpustakaan keliling setiap 2 minggu sekali. Keberadaan perpustakaan ini sebetulnya belum cukup membantu dalam menyediakan kebutuhan buku bagi klien, karena waktu kunjung perpustakaan keliling ini yang terbatas yaitu hanya 1 jam di panti. (Choerut,2012).

Dari pemaparan permasalahan diatas memunculkan ketertarikan untuk mendalami terkait pelayanan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) dan melakukan identifikasi terhadap faktor penghambat dan faktor pendukung pelayanan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita. Maka peneliti mengkaji tentang Efektivitas Pelayanan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini penting dilakukan karena akan memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas pelayanan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita. Gambaran tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan pelayanan kedepannya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori ukuran efektivitas dari Duncan dalam Steers (1985:53). Teori ini melihat ukuran efektivitas dilihat dari indikator pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Penelitian ini penting karena efektivitas pelayanan dapat mencerminkan keberhasilan pelayanan dalam menangani suatu permasalahan di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian

deskripsi kualitatif menurut Boghan dan Taylor (Moleong, 2014:3) adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati. Melalui penelitian deskriptif kualitatif, peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran dan pemahaman secara mendalam tentang efektivitas pelayanan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita pada 11 November 2016 sampai 11 Februari 2017

Subjek Penelitian

1. Sri Suprpti (Kepala Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita)
2. Dra. Suprihatin (Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial BPRSW)
3. Tulus Suseno (Pekerja Sosial BPRSW)
4. Widha Dessy A, SST (Pekerja Sosial BPRSW)
5. Siti Nurwuryastuti (Instruktur Ketrampilan Menjahit BPRSW)
6. Eri Dwi Astuti (Instruktur Ketrampilan Olah pangan BPRSW)

7. Marlita Sumarsih (Alumni Klien
BPRSW)

Instrumen Penelitian, Sumber dan Jenis Data

Instrumen atau alat pengambilan data dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri dengan dilengkapi pedoman wawancara, dan pedoman observasi. Menurut Lofland dalam Moleong (2012:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Sumber dan jenis data penelitian ini meliputi :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian melalui wawancara dan observasi terhadap informan penelitian Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini melalui proses wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari dokumen standar pelayanan publik BPRSW, dokumen laporan perlindungan dan rehabilitasi BPRSW, pergub DIY nomor 100 tahun 2015, keputusan kepala balai nomor 188/03116 tahun 2016, dokumentasi pelayanan, surat kabar dan sumber internet.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data memerlukan instrumen penelitian yang menurut Sugiyono (2012:119) merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan tiga

teknik pengumpulan data yaitu wawancara dengan teknik wawancara semi terstruktur, observasi dan juga dokumentasi.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi sumber. Untuk mengecek keabsahan data, peneliti membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan membandingkan persepsi antara satu informan dengan informan yang lain.

Teknik Analisis Data

Dalam mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Peneliti membandingkan pendapat dari pihak Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita, masyarakat, serta hasil pengamatan dan observasi peneliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis model interaktif Milles dan Huberman (1984). Teknik ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2011: 246).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas menurut Mullins dalam Rukman (2006:14) adalah efektif harus terkait pencapaian tujuan dan sasaran suatu tugas dan pekerjaan terkait juga dengan kinerja dari proses pelaksanaan suatu pekerjaan. Hal ini diperjelas oleh Martani dan Lubis (1987:55) yang mengartikan bahwa efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Melihat pengertian efektivitas tersebut, pelaksanaan pelayanan Balai

Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita adalah suatu upaya Dinsos DIY untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh BPRSW sebelumnya.

Efektivitas Pelayanan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian tujuan dan ketepatan sasaran yang telah dicapai oleh BPRSW dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Untuk dapat menganalisis efektivitas pelayanan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita dapat dinilai dari beberapa indikator menurut Duncan dalam Steers (1985:53) yaitu pencapaian tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Berikut penjabaran masing-masing indikator tersebut:

1. Pencapaian Tujuan

Menurut Duncan dalam Steers (1985:53) dalam pencapaian tujuan diperlukan pentahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Hal ini didukung oleh Gibson dalam Tangkilisan (2005:65) yang mengatakan bahwa suatu efektivitas dapat diukur dari kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Makmur (2011:7-9) mengungkapkan bahwa tujuan yang tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu : 1) Kurun waktu pencapaiannya, 2) ketepatan sasaran yang merupakan target kongkrit, 3) Dasar hukum.

Pertama, dalam kurun waktu pencapaian pelaksanaan pelayanan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita telah efektif. Karena target waktu yang ditetapkan oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita tidak mengacu pada lamanya pelaksanaan pelayanan yang telah diikuti tetapi mengacu pada kemampuan mental. Penentuan waktu satu tahun pelayanan sebagai pedoman dasar pelayanan.

Kedua, Dalam poin ketepatan sasaran Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita telah memenuhi sasaran yang telah ditetapkan. Makmur (2011: 7-9) yang mengungkapkan bahwa dalam penentuan sasaran yang tepat sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Sasaran pelayanan BPRSW adalah Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Wanita dari keluarga *broken home* / terlantar, Wanita putus sekolah, wanita korban kekerasan seksual, wanita Eks TS, Wanita Korban KDRT, Wanita Korban Eksploitasi, Wanita pekerja Migran Bermasalah sosial, wanita korban *trafficking*/ perdagangan orang dan wanita dengan kehamilan tidak dikehendaki. Ketepatan sasaran pelayanan dapat dilihat dari data klien pada bulan Juni 2016. Pada data bulan Juni tahun 2016, wanita korban *trafficking* berjumlah 1 klien, wanita putus sekolah sebanyak 6 klien, Wanita rawan Sosial Ekonomi sebanyak 28 klien, Wanita Korban kekerasan fisik, seksual dan psikis sebanyak 13 klien dan wanita *broken home* sebanyak 2 klien. Dari data

tersebut dapat dilihat klien yang mendapat pelayanan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi sesuai dengan indikator sasaran yang telah ditentukan. Selain ketepatan sasaran dalam hal permasalahan klien. BPRSW juga sudah sesuai dengan sasaran usia yang telah ditentukan yang dilihat dari 50 klien, 38 klien yang ada sudah sesuai dengan sasaran usia 17 – 40 tahun sedangkan usia < 17 tahun sejumlah 7 klien dan usia > 40 sejumlah 1 klien.

Ketiga, Dasar hukum pelayanan yang digunakan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita adalah Keputusan Kepala Balai Nomor 188/03116 Tahun 2016 tentang penetapan standar pelayanan publik pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta telah sesuai dengan pelayanan yang diberikan, SPP yang diterapkan yang diterapkan sudah sesuai dengan SPP yang telah ditetapkan. Standar Pelayanan yang ada pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Meliputi ruang lingkup pelayanan barang, jasa dan administratif.

Pencapaian tujuan dalam pelayanan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta dilihat dari kurun waktu yang digunakan dalam pelayanan, ketepatan sasaran dan dasar hukum yang digunakan

2. Integrasi

Menurut Nazaruddin dalam Claude (1994 :13), Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan

sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Emitai dalam Indrawijaya (2010:187) menyatakan bahwa integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) Prosedur, (2) Proses Sosialisasi.

Pertama, Prosedur dalam pelayanan dibutuhkan untuk mempermudah klien untuk mendapatkan pelayanan yang diberikan. Dalam faktor prosedur pelayanan di BPRSW, prosedur yang dijalankan dalam memberikan pelayanan sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh BPRSW sebelumnya. Prosedur yang dijalankan di ikuti secara runtun dan saling terkait satu sama lain sehingga memudahkan klien dan pekerja sosial untuk menerima dan memberikan pelayanan. Dalam hal Prosedur Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Wanita sudah cukup efektif.

Kedua, faktor sosialisasi, sosialisiasi yang dilakukan terkait pelayanan telah dilakukan secara optimal dan efektif. Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Sosial dengan melibatkan pekerja sosial Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita. Sosialisasi dilakukan di wilayah-wilayah Yogyakarta yang terindikasi terdapat permasalahan Wanita

Rawan Sosial Psikologis. Sehingga sosialisasi yang dilakukan sudah efektif karena menuju pada wilayah yang terdapat sasaran dari BPRSW itu sendiri.

Dalam indikator integrasi terdapat dua hal yang diperhatikan yaitu prosedur dan sosialisasi. Dalam hal prosedur untuk mendapatkan pelayanan yang ditetapkan dan diterapkan sudah sesuai.

3. Adaptasi

Menurut Duncan dalam Steers (1985:53) adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Shaun Tyson dan Tony Jackson (2000:233-235) menyatakan bahwa adaptasi adalah kemampuan untuk menanggapi perubahan lingkungannya, kecakapan untuk membuat inovasi dan memecahkan masalah. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu (1) peningkatan kemampuan, (2) sarana dan prasarana. Hal ini diperjelas dengan yang diungkapkan oleh Gibson dalam Tangkilisan (2005:65) bahwa salah satu indikator efektivitas adalah tersedianya sarana dan prasarana.

Pertama, Dalam hal peningkatan kemampuan, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Balai diklat. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita hanya memfasilitasi pengadaan pelatihan. Materi dan diklat diberikan oleh BKD yang bekerja sama dengan Balai diklat sesuai

kebutuhan pegawai BPRSW. Selain itu pekerja sosial BPRSW melakukan peningkatan kemampuan melalui sharing dan studi banding di Panti Sosial Bina Remaja Bambu Apus Jakarta setiap tahunnya.

Kedua, faktor kelengkapan sarana dan prasarana Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita sudah lengkap dan sudah memadai sehingga memudahkan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita untuk memberikan pelayanan kepada klien tanpa terkecuali sarana dan prasana dalam mendukung diadakannya pelatihan ketrampilan.

Selain memudahkan dalam memberikan pelayanan dan mendukung pelatihan ketrampilan, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita juga memberikan fasilitas pribadi kepada klien. Fasilitas yang ada di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita juga terjaga dengan adanya teknisi atau petugas yang bertugas melakukan pengadaan dan perbaikan apabila ada fasilitas atau sarana dan prasarana yang rusak dan perlu diganti. Dengan lengkapnya sarana dan prasarana dapat dikatakan bahwa poin kelengkapan sarana dan prasarana ini sudah efektif di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita.

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita sudah beradaptasi dengan baik berdasarkan indikator peningkatan kemampuan dan sarana dan prasarana.

4. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam pelayanan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta adalah Perbedaan latar belakang permasalahan klien yang menyebabkan perbedaan sikap dan sifat masing-masing klien dalam menerima pelayanan dari BPRSW. Masih rendahnya partisipasi masyarakat sehingga kurang terpenuhinya kuota target yang telah ditentukan oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita.

5. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pelayanan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita adalah kelengkapan sarana dan prasarana yang ada. Kelengkapan sarana dan prasarana yang ada dapat membantu kelancaran pelayanan yang diberikan. Selain kelengkapan sarana dan prasarana faktor pendukung selanjutnya adalah kerja sama antar pegawai. Dengan adanya kerja sama antar pegawai maka dapat saling menutupi kekurangan masing-masing pegawai dalam memberikan pelayanan tanpa meninggalkan tanggung jawab masing-masing. Dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana dan kerja sama antar pegawai maka pelayanan yang diberikan oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita lebih efektif.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka simpulan dari penelitian ini adalah :

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Daerah Istimewa Yogyakarta sudah efektif. Pengukuran efektivitas dilakukan dengan menggunakan indikator efektivitas menurut Duncan, yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Pelayanan yang dilakukan oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita sudah mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Dibuktikan dengan tercapainya tujuan dilihat dari kurun waktu pelayanan, sasaran yang telah ditetapkan dan dasar hukum yang diterapkan, pelayanan di BPRSW terintegrasi dengan baik dilihat dari prosedur dan sosialisasi yang dilakukan, dan BPRSW mampu beradaptasi dengan baik dilihat dari peningkatan kemampuan dan sarana dan prasarana. Faktor penghambat dari pelayanan BPRSW adalah perbedaan latar belakang masalah klien dan masih rendahnya partisipasi masyarakat sehingga kurang terpenuhinya kuota target yang telah ditentukan oleh BPRSW.

Saran

Berdasarkan data hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi saran yang diberikan peneliti, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah Perlu menambah sosialisasi terkait pelayanan secara merata dan menjangkau seluruh wilayah yang teridentifikasi terdapat permasalahan sosial.

2. Perlunya menambah alokasi dana untuk kegiatan pendampingan di BPRSW Yogyakarta.
3. Perlunya menambah sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola BPRSW
4. Perlunya pengawasan yang bertahap pada pelatihan ketrampilan agar klien mampu mengikuti ketrampilan secara tertib.
5. Perlunya menambah buku pegangan materi ketrampilan dan buku bacaan lain bagi klien.
6. Perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penjangkauan dan penjangkauan wanita rawan sosial psikologis agar mereka dapat memperoleh pelayanan di BPRSW Yogyakarta.
7. Perlunya partisipasi masyarakat baik berupa fisik maupun non fisik pada pelaksanaan pendampingan di BPRSW Yogyakarta.

<https://yogyakarta.bps.go.id/> pada tanggal

20 Oktober 2016 pukul 15.09.

Budhi wibhawa dkk .2010 .*Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial Pengantar Profesi Pekerja Sosial*.Bandung : Widya Padjajaran

Milles, M,B dan Huberman, A.M.1994.*Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. New York : SAGE Publications

Steers Richard M. 2005.*Efektivitas Organisasi*. Jakarta:Erlangga

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Tangkilisan, Hessei N S.2005.*Manajemen Publik*.Jakarta:Grasindo

Tyson, Shaun dan Tony Jackson. 2000. *Perilaku Organisasi*. Andi and Pearson Education Asia Pte Ltd, Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta.2016.*Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta*.Diakses dari